

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan merupakan upaya memajukan, memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada, namun berbeda halnya pengembangan dengan pembangunan, namun dalam aplikasinya tidak mudah membedakan kedua istilah tersebut. Oleh karena itu pada hakikatnya pengertian pengembangan sudah termasuk dalam pengertian pembangunan. Kegiatan pembangunan pada dasarnya dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Menurut Sukirno (2000), kegiatan pengembangan wilayah adalah suatu kegiatan yang memiliki dua sifat yaitu sifat akademis dan sifat birokratis dalam mengelola wilayah, pengembangan wilayah didefinisikan sebagai upaya menata ruang dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan suatu wilayah merupakan salah satu hal yang penting demi suatu kemajuan dari suatu daerah maupun kecakupan yang lebih besar yaitu negara. Wilayah yang sedang berkembang pada umumnya memiliki berbagai masalah - masalah yang dapat memberi dukungan ataupun sebaliknya memberi hambatan untuk perkembangan suatu wilayah tersebut. Dalam perkembangan zaman saat ini yang semakin pesat perkembangannya banyak perubahan- perubahan yang telah terjadi, seperti halnya teknologi yang semakin pesat perkembangannya demikian juga sarana - prasarana dan pendidikan juga. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Dalam artian masih banyak yang harus di persiapkan untuk bisa lebih berkembang dan lebih maju.

Pembangunan merupakan upaya yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat demi memajukan suatu wilayah tersebut. Sumberdaya alam yang terdapat pada suatu wilayah pada dasarnya merupakan modal dasar dari pembangunan yang perlu di eksplorasi secara tepat dengan memperhatikan kerakteristiknya. Demikian juga dengan halnya pola penggunaan lahan di wilayah tersebut. Karakteristik lahan yang kompleks membuat terjadinya persaingan dalam penggunaan lahan untuk berbagai aktivitas. Pengendalian dan pengawasan pengembangan lahan adalah suatu upaya untuk dapat secara berkelanjutan mengarahkan pemanfaatan, penggunaan dan pengembangan lahan secara terpadu dan efektif. Berbeda dengan sistim pembangunan pada era orde baru yang bertitik tolak dari GBHN yang berisi garis besar rencana pembangunan yang ditetapkan oleh MPR, sistim pembangunan pada era reformasi saat ini bertolak dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang berisi rencana pembangunan (lima tahun) yang disusun oleh Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Saat ini, pemerintah (pemerintah pusat) dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan pembangunan mengacu pada UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau dikenal dengan UU Otonomi Daerah sebagai amandemen dari UU nomor 22 dan 25 tahun 1999. Di samping itu berbagai UU lainnya seperti UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU nomor 2 tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang, UU nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan UU lainnya yang telah mendapatkan persetujuan DPR-RI digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan.

Bedasarkan pola pikir yang di uraikan, maka hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya yang dilakukan sesuai karakteristi masing - masing wilayahnya, dimana di laksanakan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Sehingga pembangunan bisa terlaksana secara efektif dan bermanfaat. Apabila pembangunan sudah berjalan dengan baik maka akan tampak langsung perkembangan dari suatu wilayah. Dan pengembangan wilayah akan tercapai secara merata dan efektif sesuai dengan karakteristiknya masing - masing. Namun dalam hal perkembangan wilayah saat sekarang ini masih banyak yang belum terlihat, terutama di daerah - daerah yang berada di pedalaman masih banyak pembangunan yang belum terlihat berjalan sehingga pengembangan wilayahnya pun belum terlihat. Sebagai akibat dari pembangunan terutama di bidang ekonomi telah melahirkan kesenjangan antara daerah kaya dan daerah miskin ataupun tertinggal yang pada umumnya sering di sebut dengan daerah tertinggal. Menurut E. Salim (1999), faktor - faktor yang mempengaruhi terbentuknya desa tradisional adalah (1) pada umumnya wilayah yang di huni tidak memiliki faktor produksi seperti, tanah yang subur, kekayaan SDA, (2) tingkat pendidikan masyarakatnya rendah, (3) keadaan permukaan bumi yang kasar, (4) sarana transportasi yang miinim, serta (5) adat istiadat yang kaku. Pengembangan wilayah secara realistis memperhatikan tuntutan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sehingga aktivitas prekonomian dalam wilayah dapat berjalan dengan baik yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu kegiatannya adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor- faktor produksi, pengolahan dan pemasaran, serta mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dengan berbagai sarana. Pengembangan wilayah yang dilakukan

menitikberatkan pada aspek ruang atau lokasi untuk mengoptimalkan sumberdaya alam yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Tambusai Utara merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Rata - rata penduduk kecamatan Tambusai Utara memiliki mata pencaharian sebagai petani kelapa sawit walaupun ada yang bekerja di suatu instansi, yang ternyata belum mampu menjadikan kawasan kecamatan ini menjadi lebih berkembang, padahal Kecamatan Tambusai Utara secara ekonomi sosialnya sudah dikatakan berkecukupan, karena adanya penggunaan lahan di kecamatan ini yakni perkebunan kelapa sawit rakyat yang membuat pendapatan masyarakat kecamatan ini sudah berkecukupan di bandingkan kecamatan di sekitarnya yang sudah lebih berkembang. Anggapan ini di dasarkan pada pengamatan sementara yang penulis lakukan dengan melihat keadaan dan situasi Kecamatan Tambusai Utara dimana kondisi prasarana jalan yang masih minim di dominasi dengan jalan tanah yang belum di aspal dan keadaan yang rusak, demikian juga dengan sistem penerangan listrik rumah penduduk yang masih banyak menggunakan mesin diesel sendiri masing - masing rumah dan bahkan ada yang menggunakan lampu minyak, karena PLN belum masuk ke wilayah Kecamatan Tambusai Utara. Dari segi pengolahan pertanian masyarakat Kecamatan Tambusai Utara masih menggunakan alat - alat yang masih belum modern. Padahal tingkat pendapatan masyarakat kecamatan ini sudah dikatakan berkecukupan tetapi pengembangan untuk wilayahnya belum terlihat.

Dengan demikian pengembangan wilayah Kecamatan Tambusai Utara ini terjadi dengan sendirinya saja dengan sedikit campur tangan perencanaan dari pemerintah maupun masyarakat di kecamatan ini, pengembangan wilayahnya terjadi



seusai dengan berjalannya waktu tanpa ada perencanaan yang baik. Berbagai masalah yang di hadapi Kecamatan Tambusai Utara menjadi sorotan penulis untuk lebih lanjut mengetahui berbagai hal yang menghambat pengembangan wilayah di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini.

### **B. Identifikasi Masalah**

Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya pengembangan wilayah di kecamatan Tambusai Utara ini antara lain (1) keadaan ekonomi yang dalam hal ini menyangkut jenis pekerjaan, dan pendapatan masyarakatnya, (2) potensi fisik wilayah yang dalam hal ini menyangkut tentang penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Tambusai Utara, luasan wilayah, letak wilayah, (3) potensi non fisik yang meliputi keadaan sarana dan prasarana seperti fasilitas umum, jalan raya, penerangan, (4) pendidikan masyarakat, keterampilan, serta mutu masyarakat kecamatan Tambusai Utara, (5) pengolahan pertanian yang masih menggunakan alat yang sederhana belum menggunakan alat modern, (6) potensi kecamatan untuk dilakukan pengembangan wilayah.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang di bahas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada (1) faktor fisik wilayah yang meliputi penggunaan lahan, luasan wilayah, letak wilayah, (2) faktor non fisik yang meliputi jenis pekerjaan, dan pendapatan masyarakatnya, keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Tambusai Utara yang meliputi pemberadaan fasilitas umum, jalan raya dan penerangan (3) pengaruh faktor geografi terhadap pengembangan wilayah kecamatan Tambusai Utara.

#### **D. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor fisik yang mempengaruhi pengembangan wilayah Kecamatan Tambusai Utara
2. Bagaimana faktor non fisik yang mempengaruhi pengembangan wilayah Kecamatan Tambusai Utara.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor fisik yang mempengaruhi pengembangan wilayah kecamatan Tambusai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor non fisik yang mempengaruhi pengembangan wilayah kecamatan Tambusai Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan wilayah kecamatan Tambusai Utara.
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat dalam meningkatkan potensi kecamatan Tambusai Utara.
3. Sebagai bahan referensi kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama dengan daerah yang berbeda.

